

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada di jalur Cincin Api Pasifik, yang membuatnya sering mengalami bencana alam. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Semarang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dengan 1.705 kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor tercatat pada periode 2018-2022. Untuk mengurangi dampak bencana, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan membentuk BPBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala serta mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi dalam penanggulangan bencana dan dampaknya terhadap kinerja BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Semarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, dengan menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjektif dari pihak terkait. Selain itu, pendekatan hukum non-doktrinal diterapkan untuk menganalisis regulasi yang berlaku dan implementasinya dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politis, dan administratif. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan observasi untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana, efektivitas regulasi, dan peran BPBD dalam mitigasi bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Namun, koordinasi tersebut terhambat oleh masalah sinkronisasi data, keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan bencana belum maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan, SDM yang terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai. BPBD Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai langkah seperti rencana kontinjensi, simulasi siap siaga, dan kerja sama lintas sektor, namun terkendala dalam hal logistik, komunikasi, dan administrasi dalam respons darurat. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar sektor dan optimalisasi alokasi anggaran serta infrastruktur mitigasi bencana.

Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara; Kebijakan; Regulasi; Bencana; BPBD.

ABSTRACT

Indonesia is a disaster-prone country due to its location on the Pacific Ring of Fire, which causes frequent natural disasters. According to data from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Semarang Regency has a high disaster risk, with 1,705 incidents of floods and landslides recorded between 2018 and 2022. To mitigate the impacts of disasters, the Indonesian government enacted Law No. 24 of 2007 on Disaster Management and established BPBD. This study aims to explore the challenges and evaluate the effectiveness of the regulations' implementation in disaster management and its impact on the performance of BPBD in carrying out disaster mitigation tasks in Semarang Regency.

The approach used in this research is qualitative, focusing on a deeper understanding of the phenomena by exploring the experiences, perceptions, and subjective understanding of the relevant stakeholders. Additionally, a non-doctrinal legal approach is applied to analyze the applicable regulations and their implementation in a broader context, taking into account social, political, and administrative aspects. The methods used include literature study, interviews, and observation to analyze the implementation of disaster management policies, the effectiveness of regulations, and the role of BPBD in disaster mitigation.

The results show that good coordination between BPBD, local government, TNI (Indonesian National Army), Polri (Indonesian National Police), and non-governmental organizations is essential for disaster management. However, this coordination is hindered by issues such as data synchronization, budget limitations, lengthy bureaucracy, and lack of public participation. The effectiveness of Law No. 24 of 2007 in disaster management has not been maximized due to overlapping authorities, limited human resources, and insufficient supporting facilities. BPBD of Semarang Regency has implemented contingency plans, readiness simulations, and cross-sector cooperation, but faces challenges in logistics, communication, and administration during emergency responses. The study recommends improving inter-sector coordination, optimizing disaster management budgets, and enhancing infrastructure for disaster mitigation.

Keywords: Administrative Law; Policy; Regulations; Disaster; BPBD.